

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU BERDASARKAN
VALUE FOR MONEY AUDIT**

Firda Rahmadhany Arief, Yessi Muthia Basri dan Novita Indrawati

Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Riau
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah (BD) dan Pembiayaan Daerah ditinjau dari perspektif ekonomi, efisiensi dan efektifitas dengan menggunakan konsep value for money audit. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan mengumpulkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2011 sampai dengan 2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditinjau dari perspektif ekonomi menunjukkan hasil rasio ekonomi PAD Provinsi Riau tahun 2011 adalah “cukup ekonomis”, rasio ekonomi PAD Provinsi Riau tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah “kurang ekonomis” dan tahun 2015 adalah “tidak ekonomis”. Rasio efisiensi PAD Provinsi Riau tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah “sangat efektif” Rasio efektivitas PAD Provinsi Riau tahun 2011, 2012 dan 2014 adalah “sangat efektif”, sedangkan tahun 2013 dan 2015 adalah “efektif”. Rasio efisiensi Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah “tidak efektif”. Rasio efektifitas Belanja Daerah Provinsi Riau pada tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah “cukup efektif”, kemudian tahun 2014 dan 2015 adalah “kurang efektif”. Rasio efektifitas Pembiayaan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2011 adalah “efektif”, sedangkan pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah “sangat efektif”. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja keuangan diantaranya adalah dengan melakukan peningkatan pelayanan di bidang pajak untuk meningkatkan PAD, melakukan penghematan anggaran berupa pemberian insentif dalam upaya efisiensi dan efektifitas Belanja Daerah dan melakukan penanaman modal untuk optimalisasi Pembiayaan Daerah.

Kata Kunci : Value for money audit, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban setiap kepala daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah merupakan keharusan dalam mewujudkan *good government governance* atau tata kelola pemerintah yang baik.

Tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good government governance* diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Menurut Ardila (2015) salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangannya melalui perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari sisi input, output, outcome, impact, dan benefitnya.

Tabel 1 : Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010-2015

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah	Persentase	
				PAD	PT
2010	1.700.950.858.456	2.595.007.357.283	4.305.465.216.039	39,51	60,27
2011	2.210.130.782.733	3.226.836.380.424	5.440.440.485.157	40,62	59,31
2012	2.588.688.445.077	3.618.842.730.571	6.847.315.819.648	37,81	52,85
2013	2.725.623.913.109	3.610.182.229.607	6.994.646.204.554	38,97	51,61
2014	3.245.087.745.089	4.231.808.633.743	8.132.409.891.832	39,90	52,04
2015	3.476.516.235.044	2.548.627.473.189	6.911.044.805.838	50,30	36,88

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Riau (BPKAD, 2016)

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2014 Pendapatan Transfer (PT) masih lebih besar jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Pada tahun 2015 antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau telah mencapai 50,30% dari total Pendapatan Daerah, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah mampu mewujudkan kinerja yang semakin baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya. Namun demikian, efektifitas, efisisnesi dan sisi ekonomis dalam pencapaian PAD yang optimal masih belum tergambar.

Pendapatan Asli Daerah tersebut merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang pada dasarnya akan digunakan untuk mendanai Belanja Daerah. Belanja Daerah yang dikelola oleh pemerintah secara efisien dan efektif akan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Berapapun besarnya pendapatan akan menjadi kurang bermakna apabila dalam pola belanjanya masih terjadi pemborosan-pemborosan dan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk melihat bagaimana Belanja Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 : Persentase Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2010-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2010	4.267.432.658.673,32	3.791.406.471.379,83	476.026.187.293,49	11,15
2011	4.797.600.670.278,22	4.265.129.660.304,03	532.471.009.974,19	11,10
2012	8.373.811.701.788,19	6.670.765.136.944,64	1.703.046.564.843,55	20,34
2013	8.915.522.031.720,57	7.525.282.506.040,30	1.390.239.525.680,27	15,59
2014	8.848.296.291.336,97	5.602.074.495.738,66	3.246.221.795.598,31	36,69
2015	11.388.481.944.547,70	7.760.972.468.295,68	3.627.509.476.252,02	31,85

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Riau (BPKAD, 2016)

Berdasarkan Tabel 2 maka dapat diketahui bahwa selama enam tahun terakhir selalu terjadi selisih antara anggaran dan realisasi dari Belanja Daerah. Secara keseluruhan realisasi Belanja Daerah selalu lebih kecil jika dibandingkan dengan anggarannya. Kecilnya realisasi tidak hanya mengindikasikan keefisienan pengelolaan keuangan, namun juga terdapat indikasi bahwa Pemerintah Provinsi Riau tidak mampu mengelola Belanja Daerah tersebut untuk dapat direalisasikan dengan lebih maksimal dalam rangka pembangunan.

Selain Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah juga mencakup Pembiayaan Daerah. Tabel 3 di bawah ini menggambarkan Pembiayaan Daerah di Provinsi Riau.

Tabel 3 : Data Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2010-2015

Tahun	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Pembiayaan Netto	% Kenaikan/ Penurunan Pembiayaan Netto
2010	114,113,782,628	222,429,600,144	(108,315,817,515)	-
2011	421,520,452,684	257,449,709,250	164,070,743,433	251,47
2012	1,906,680,479,264	105,429,892,885	1,801,250,586,379	997,85
2013	1,978,312,714,768	0	1,978,312,714,768	9,83
2014	1,451,086,907,269	0	1,451,086,907,269	-26,65
2015	3,981,811,287,454	0	3,981,811,287,454	174,41

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Riau (BPKAD, 2016)

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Riau mengelola dana SiLPA yang merupakan surplus ataupun deficit anggaran dengan melakukan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2013 sampai dengan 2014 Pemerintah Provinsi Riau tidak melakukan aktivitas pengeluaran pembiayaan dan hanya menerima pembiayaan saja yang pada umumnya berasal dari SiLPA. Artinya dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Riau masih belum mengoptimalkan Belanja Daerah untuk melakukan pembangunan. Kenaikan Pembiayaan Netto pada tahun 2015 sebagian besar berasal dari SiLPA, dan hanya sebagian kecil yang berasal dari investasi yang dilakukan. Artinya, Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini juga belum memanfaatkan surplus anggaran untuk berinvestasi. Pada konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance* yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Sehingga konsep *value for money* ini sangat dibutuhkan sebagai pendukung pengelolaan keuangan daerah dan dana daerah (Putra & Wirawati, 2015).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 7) untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah maka perlu dilakukan pengukuran kinerja pemerintah dengan menggunakan metode *value for money audit*. *Value for money* menurut Mardiasmo (2009: 4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan input dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan (Bastian, 2006:77). Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Atau dengan kata lain efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Bastian, 2006 : 77).

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan (Bastian, 2006:77).

Menurut Mahsun (2006: 179) rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Kriteria ekonomi sebagai penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dalam Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4 : Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan Pemerintah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100 %	Sangat ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup ekonomis
60% - 80 %	Kurang ekonomis
< 60%	Tidak ekonomis

Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996

Halim (2008: 164) menyebutkan bahwa efisiensi dinyatakan dalam rasio efisiensi. Hal itu berarti bahwa rasio menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Kriteria efisiensi sebagai penilaian kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5 : Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100 %	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80 %	Efisien
< 60%	Sangat efisien

Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996

Halim (2008: 234) menyatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kriteria efektivitas sebagai penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dalam Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6 : Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100 %	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80 %	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri Nomor 600.900.327 Tahun 1996

Nugrahani (2007) membuktikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah DIY cukup ekonomis. Kinerja keuangan pemerintah yang terbukti ekonomis dibuktikan pula oleh Ariana, dkk (2012), Andriani (2013), Sari (2015), bahkan Putra dan Wirawati (2015) membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah sangat ekonomis. Kurrohman (2013) juga membuktikan bahwa Pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja. Namun Ardila & Putri (2015), membuktikan sebaliknya.

Kinerja keuangan pemerintah yang efisien dibuktikan oleh penelitian Nugrahani (2007), Ariana, dkk (2012), Sari (2015), Putra dan Wirawati (2015), Julita (2015) dan Hidayat & Riharjo (2015). Namun Pangkey dan Pinatik (2015) juga Ardila & Putri (2015) membuktikan sebaliknya dimana kinerja keuangan pemerintah daerah ternyata tidak efisien. Kinerja keuangan pemerintah yang efektif dibuktikan oleh Ariana, dkk (2012), Purnamasari (2014), Hidayat & Riharjo (2015), Ardila & Putri (2015), Sari (2015). Putra dan Wirawati (2015) membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah sangat efektif. Namun Nugrahani (2007) membuktikan sebaliknya. Demikian pula dengan Kadafi (2014) yang menyatakan bahwa efektifitas masih belum maksimal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode wawancara kemudian mengumpulkan data (sekunder) berupa Laporan Realisasi Anggaran yang dilakukan di Badan Pengelolaan Aset Daerah (BKPAD) Provinsi Riau dan Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan berdasarkan metode *value for money audit*. Menurut Putra dan Wirawati (2015) untuk mengukur rasio ekonomi PAD dapat menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi biaya untuk memungut PAD}}{\text{Anggaran biaya untuk memungut PAD}} \times 100\%$$

Menurut Putra dan Wirawati (2015) untuk mengukur rasio ekonomi PAD dapat menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Menurut Ariana (2012) rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini di gunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi BD} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Putra (2015) untuk mengukur rasio efektifitas PAD dapat menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rumus pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut :

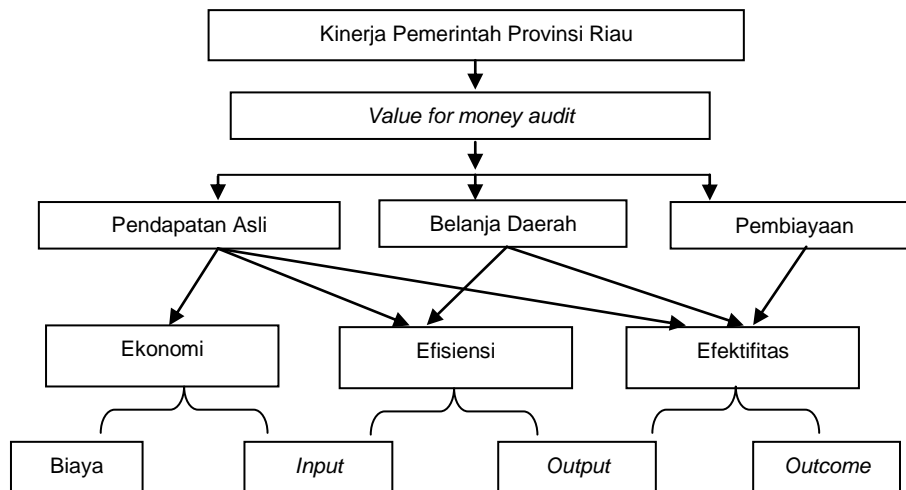
$$\text{Rasio Efektifitas BD} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Daerah}}{\text{Target Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menghitung efektifitas Pembiayaan Keuangan Daerah maka diambil dari rumus di atas yang kemudian di-*proxy* dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas Pembiayaan} = \frac{\text{Realisasi Pembiayaan}}{\text{Target Pembiayaan}} \times 100\%$$

Adapun alur model penelitian yang menjadi kerangka dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1 : Kerangka Penelitian



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi

Adapun data anggaran dan realisasi serta kriteria ekonomis pada Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7 : Kinerja Ekonomi PAD Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Tahun	Biaya Dalam Memungut PAD			Kriteria
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
2011	13.514.185.000	11.539.485.524	85,39	Cukup ekonomis
2012	18.412.592.850	14.694.655.734	79,81	Kurang ekonomis
2013	15.220.439.450	10.007.324.076	65,75	Kurang ekonomis
2014	17.263.813.645	10.674.578.332	61,83	Kurang ekonomis
2015	18.489.325.148	9.522.798.855	51,50	Tidak ekonomis

Sumber : Hasil Olahan Data (2016)

Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2011 kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dalam kriteria “cukup efektif” karena keadaan ekonomi yang menyebabkan berkurangnya pembelian kendaraan bermotor.

Akibatnya, biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD juga tidak dapat direalisasikan secara penuh. Pada tahun 2012 termasuk dalam kriteria “kurang efektif” karena pencairan dana Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah tertunda pelaksanaannya. Pada tahun 2013 adalah “kurang efektif” karena sumber daya manusia yang masih belum memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan. Pada tahun 2014 adalah “kurang efektif” karena kegiatan Pemuktahiran Data Base Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT/ UP Dipenda Provinsi pada tahun ini hanya dapat 10% saja. Pada tahun 2015 dalam kondisi yang tidak ekonomis karena kurang salurnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pusat sehingga menyebabkan penerimaan pendapatan Provinsi Riau tidak optimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau dari Perspektif Efisiensi

Adapun hasil efisiensi PAD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 : Kinerja Efisiensi PAD Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Tahun	Biaya Memungut PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria
2011	55.742.101.179	2.210.130.782.734	2.52	Sangat efisien
2012	66.468.424.636	2.588.688.445.077	2.57	Sangat efisien
2013	64.519.802.338	2.725.623.913.109	2.37	Sangat efisien
2014	75.576.333.234	3.245.087.745.090	2.33	Sangat efisien
2015	79.062.000.808	3.476.960.097.649	2.27	Sangat efisien

Sumber : Hasil Olahan Data (2016)

Berdasarkan tabel di atas kinerja PAD Provinsi Riau selama lima tahun terakhir adalah “sangat efisien”.

Belanja Daerah (BD) Ditinjau dari Perspektif Efisiensi

Adapun hasil efisiensi Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 : Kinerja Efisiensi Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	%	Kriteria
2011	2,538,187,732,600	4,265,129,660,304	59.51	Tidak efisien
2012	3,425,711,795,518	6,670,765,136,945	51.35	Tidak efisien
2013	4,232,409,978,641	7,525,282,506,040	56.24	Tidak efisien
2014	2,170,603,791,020	5,602,074,495,739	38.75	Tidak efisien
2015	3,627,234,830,457	7,760,972,468,296	46.74	Tidak efisien

Sumber : Hasil Olahan Data (2016)

Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2011 berada dalam kriteria “tidak efisien” karena penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan anggaran yang besar seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan masih belum optimal. Pada tahun 2012 adalah “tidak efisien” karena proses lelang yang dilaksanakan pada tahun 2012 mengalami beberapa masalah. Pada tahun 2013 adalah “tidak efisien” karena terjadi perpindahan jabatan yaitu Gubernur Riau. Dengan adanya pejabat baru maka diperlukan mekanisme dalam menyelenggarakan proses lelang dan pencairan dana Belanja Daerah yang baru. Hal ini menyebabkan anggaran sulit untuk segera dicairkan. Pada tahun 2014 adalah “tidak efisien” karena pada tahun 2014 terjadi pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru. Pada tahun 2015 adalah “tidak efisien” karena kegiatan baru dapat dimulai pada pertengahan tahun. Akibatnya proses pelelangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan banyak yang tidak dapat dilakukan.

Pendapatan Daerah (PD) Ditinjau dari Perspektif Efektifitas

Efektifitas PD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10 : Kinerja Efektifitas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Kriteria
2011	4,624,516,532,826.31	5,440,440,485,157.83	118	Sangat Efektif
2012	6,639,430,133,500.64	6,847,315,819,648.20	103	Sangat Efektif
2013	6,937,720,762,637.46	6,994,646,204,554.06	101	Sangat Efektif
2014	7,400,619,878,055.10	8,132,409,891,832.53	110	Sangat Efektif
2015	7,407,059,641,183.97	6,911,044,805,838.19	93	Efektif

Sumber : Hasil Olahan Data (2016)

Belanja Daerah (BD) Ditinjau dari Perspektif Efektifitas

Efektifitas PD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 : Kinerja Efektifitas Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Kriteria
2011	4,797,600,670,278.22	4,265,129,660,304.03	88,90	Cukup Efektif
2012	8,373,811,701,788.19	6,670,765,136,944.64	79,66	Kurang Efektif
2013	8,915,522,031,720.57	7,525,282,506,040.30	84,41	Cukup Efektif
2014	8,848,296,291,336.97	5,602,074,495,738.66	63,31	Kurang Efektif
2015	11,388,481,944,547.70	7,760,972,468,295.68	68,15	Kurang Efektif

Sumber : Hasil Olahan Data (2016)

Kinerja Belanja Daerah Provinsi Riau pada tahun 2011 hanya berada pada kriteria “cukup efektif” karena Belanja Langsung yang masih belum optimal realisasinya disebabkan karena masalah pelelangan yang mengharuskan pihak panitia lelang mengambil penawaran terendah. Sehingga dapat dipastikan realisasi Belanja Langsung tidak mencapai angka 100%. Pada tahun 2012 adalah “kurang efektif” karena Belanja Subsidi dan Belanja Tidak terduga yang sudah ditetapkan dalam anggaran, pada kenyataannya tidak dapat direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, realisasi Belanja Modal yang merupakan belanja yang secara langsung diperuntukkan bagi pembangunan daerah hanya dapat direalisasikan sebesar 79% saja. Pada tahun 2013 adalah “cukup efektif” karena Pemerintah Provinsi Riau menargetkan Belanja Tidak Terduga untuk tahun 2013, namun pada kenyataannya tidak merealisasikan belanja ini sama sekali, sehingga persentase realisasinya adalah 0%.

Pada tahun 2014 adalah “kurang efektif” karena Belanja Langsung hanya mampu diselesaikan sebesar 46%. Hal ini karena adanya SOTK baru yang menyebabkan Satker bekerja dengan waktu yang sedikit. Pada tahun 2015 adalah “kurang efektif” karena terdapat Belanja Bantuan Keuangan yang hanya dapat direalisasikan sebanyak 35%.

Pembiayaan Daerah Ditinjau dari Perspektif Efektifitas

Efektifitas Pembiayaan Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 : Efektifitas Pembiayaan Daerah Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Kriteria
2011	165,684,137,452.91	164,070,743,433.75	99,03	Efektif
2012	1,734,381,568,287.55	1,801,250,586,379.55	103,86	Sangat Efektif
2013	1,977,801,269,083.11	1,978,312,714,768.11	100,03	Sangat Efektif
2014	1,447,676,413,281.87	1,451,086,907,269.87	100,24	Sangat Efektif
2015	3,981,422,303,363.74	3,981,811,287,454.74	100,1	Sangat Efektif

Sumber : Hasil Olahan Data (2016)

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya dalam meningkatkan PAD dilakukan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari kekayaan asli yang ada di Provinsi Riau. Adapun upaya-upaya yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan PAD adalah sebagai berikut :

1. Melakukan motivasi kepada Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

2. Memaksimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas dalam mengumpulkan atau memungut PAD sehingga tugas yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Membuat Peraturan Daerah untuk sumber-sumber PAD yang memiliki potensi namun belum ada payung hukumnya sehingga sumber-sumber tersebut dapat dijadikan sumber pendapatan yang meningkatkan PAD.
4. Melakukan kebijakan terhadap pengelolaan dan penerimaan Pajak Daerah agar penerimaan tersebut dapat maksimal. Hal ini dilakukan dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016 terkait kenyamanan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Upaya Meningkatkan Efisiensi Belanja Daerah

Upaya dalam meningkatkan efisiensi Belanja Daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut : Meningkatkan penyerapan Belanja Langsung untuk meningkatkan pembangunan di bidang infrastruktur dan sarana prasarana di Provinsi Riau. Contohnya seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta sarana pendidikan dan kesehatan.

Upaya Meningkatkan Efektifitas Belanja Daerah

Upaya dalam meningkatkan realisasi Belanja Daerah dilakukan Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah. Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Setiap Kepala SKPD mengoptimalkan percepatan penyerapan anggaran baik itu Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kepala SKPD memberikan arahan dan dorongan kepada Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) untuk dapat melaksanakan kegiatan sesegara mungkin.

Upaya Optimalisasi Pembiayaan Daerah

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam optimalisasi Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penggunaan SiLPA untuk menanggulangi defisit anggaran yang disebabkan Belanja Daerah yang dianggarkan lebih besar dari Pendapatan Daerah.
2. Melakukan rencana penyertaan modal dalam bentuk investasi non permanen untuk memperoleh penerimaan dimasa yang akan datang.
3. Mengontrol program/kegiatan terkait pembiayaan yang dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditinjau dari perspektif ekonomi dengan menggunakan konsep *value for money audit* menunjukkan hasil dimana rasio ekonomi PAD Provinsi Riau tahun 2011 adalah “cukup ekonomis”, sementara rasion ekonomi PAD Provinsi Riau tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah “kurang ekonomis”, kemudian rasion ekonomi PAD Provinsi Riau tahun 2015 adalah “tidak ekonomis”.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau ditinjau dari perspektif efisiensi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan konsep *value for money audit* menunjukkan hasil dimana rasio efisiensi PAD Provinsi Riau tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah “sangat efektif”
3. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau ditinjau dari perpektif efektivitas untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan konsep *value for money audit* menunjukkan hasil dimana rasio efektivitas PAD Provinsi Riau tahun 2011 dan 2012 adalah “sangat efektif”, sedangkan tahun 2013 adalah “efektif”, kemudian tahun 2014 adalah “sangat efektif” dan tahun 2015 adalah efektif.
4. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau ditinjau dari perpektif efisiensi untuk Belanja Daerah (BD) dengan menggunakan konsep *value for money audit* menunjukkan hasil dimana rasio efisiensi Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah “tidak efektif”.
5. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau ditinjau dari perpektif efektivitas untuk Belanja Daerah (BD) dengan menggunakan konsep *value for money audit* menunjukkan hasil dimana rasio efektifitas Belanja Daerah Provinsi Riau pada tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah “cukup efektif”, kemudian tahun 2014 dan 2015 adalah “kurang efektif”.
6. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau ditinjau dari perspektif efektifitas Pembiayaan Daerah dengan menggunakan konsep *value for money audit* menunjukkan hasil dimana rasio efektifitas Pembiayaan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2011 adalah “efektif”, sedangkan pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah “sangat efektif” .
7. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau sehingga PAD mengalami peningkatan adalah melakukan motivasi kepada Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kemudian memaksimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas dalam mengumpulkan atau memungut PAD sehingga tugas yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya membuat Peraturan Daerah untuk sumber-sumber PAD yang memiliki potensi namun belum ada payung hukumnya sehingga sumber-sumber tersebut dapat dijadikan sumber pendapatan yang meningkatkan PAD dan melakukan kebijakan terhadap pengelolaan dan penerimaan Pajak Daerah agar penerimaan tersebut dapat maksimal. Hal ini dilakukan dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016 terkait kenyamanan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

8. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan efisiensi Belanja Daerah adalah meningkatkan penyerapan Belanja Langsung untuk meningkatkan pembangunan di bidang infrastruktur dan sarana prasarana di Provinsi Riau. Contohnya seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta sarana pendidikan dan kesehatan. Sedangkan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan efektifitas Belanja Daerah adalah dengan meningkatkan peran Kepala SKPD agar dapat mengoptimalkan percepatan penyerapan anggaran baik itu Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan dan dorongan kepada Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) untuk dapat melaksanakan kegiatan sesegara mungkin.
9. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam mengoptimalkan Pembiayaan Daerah adalah dengan mengoptimalkan penggunaan SiLPA, melakukan rencana penyertaan modal dalam bentuk investasi non permanen untuk memperoleh penerimaan dimasa yang akan datang dan mengontrol program/kegiatan terkait pembiayaan yang dilakukan tersebut.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan Pemerintah Provinsi Riau lebih transparan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan, sehingga penelitian yang dilakukan akan dapat memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau.
- b. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Riau agar dapat konsisten dalam pelaksanaan anggaran dengan tidak terlalu sering melakukan mutasi jabatan sehingga anggaran yang dikelola akan lebih baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, Isna dan Ayu Anindya Putri. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Volume 15 (1) : 78 – 85.

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hidayat, Taufik Wahyu dan Ikhsan Budi Riharjo. 2015. Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntans*. Vol. 4 (11) : 1 – 17.
- Kurrohman, Taufik. 2013. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang berbasis Value For Money di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 5 (1) : 1-11.
- Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005-2008*. Jakarta Penerbit Kompas.
- Nugrahani, Tri Siwi. 2007. Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Akmenika UPY*. Volume I.
- Putra, Agus Purnomo Adi dan Ni Gusti Putu Wirawati. 2015. Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 11.1 : 252-268.